

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Politik Identitas**

Sebagai suatu konsep yang sangat mendasar, apa yang dinamakan identitas tentunya menjadi sesuatu yang sering kita dengar. Terlebih lagi, ini merupakan konsep yang menjadi basis untuk pengenalan sesuatu hal. Kita akan mengenali sesuatu halnya itu kalau kita tahu identitasnya. Ini juga akan berarti bahwa kalau kita mengenali identitas sesuatu hal, maka kita akan memiliki pengetahuan akan sesuatu halnya itu. Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina, Austria pada 1994 (Abdilah, 2002; 16).

Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan *belonging* tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas (Widayanti, 2009: 14).

Sebagai salah satu contohnya adalah dengan adanya perbedaan identitas yang tampak maupun tidak tampak, seperti halnya pada pengklasifikasian berdasarkan jenis kelamin, pria atau wanita, ini untuk identitas yang tampak. Adapun perbedaan dalam kategori identitas yang tidak tampak adalah identifikasi berdasarkan status sosial seperti keturunan.

Namun demikian, sebenarnya akan lebih mudah bila kita memahami konsep identitas ini dalam bentuk contoh. Ketika seseorang lahir, ia tentu akan mendapatkan identitas yang bersifat fisik dan juga non-fisik. Identitas fisik yang terutama dimiliki adalah apakah ia berjenis kelamin pria atau wanita. Sedangkan untuk identitas non-fisik adalah nama yang digunakan, juga status yang ada pada keluarga pada saat dilahirkan. Identitas dalam sosiologi maupun politik biasanya dikategorikan menjadi dua kategori utama, yakni identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan (citizenship)). Identitas sosial menentukan posisi subjek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subjek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (*sense of belonging*) dan sekaligus menandai posisi subjek yang lain di dalam suatu pembedaan (*sense of otherness*) (Setyaningrum, 2005: 19). Identitas politik (*political identity*) secara konseptual berbeda dengan politik identitas (*politica of identity*). Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme

Identitas politik secara konseptual berbeda dengan politik identitas. Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik. Sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik (Setyaningrum, 2005: 19).

Identitas mencitrakan kepribadian seseorang, serta bisa menentukan posisi seseorang. Ada 3 pendekatan pembentukan identitas, yaitu: 1. Primordialisme. Identitas diperoleh secara alamiah, turun temurun. 2. Konstruktivisme. Identitas sebagai sesuatu yang dibentuk dan hasil dari proses sosial yang kompleks. Identitas dapat terbentuk melalui ikatan-ikatan kultural dalam masyarakat. 3. Instrumentalisme. Identitas merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk kepentingan elit dan lebih menekankan pada aspek kekuasaan (Widayanti, 2009: 14-15). Politik identitas bisa dikatakan terjadi di setiap kelompok atau komunitas, salah satunya yang terjadi dalam serial film Upin dan Ipin. Masing-masing individu yang memiliki identitas pribadi yang berbeda dari suku, etnis dan agama telah bergabung menjadi satu komunitas yang memiliki identitas kolektif. Walaupun mereka memiliki identitas kolektif sebagai warga negara Malaysia yang sah, tidak bisa dipungkiri bahwa mereka tetap memiliki ego untuk memperjuangkan identitas pribadinya. Disinilah terjadi persaingan antar individu dalam suatu komunitas yang ada dalam film Upin dan Ipin ini. Hal ini disebut sebagai politik identitas.

Menurut Cressida Heyes (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007) mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu daripada pengorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup ideologi atau afiliasi kepartaian, politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Dalam hal ini Cressida Heyes beranggapan jika politik identitas lebih mengarah kepada kepentingan terhadap individu atau kelompok yang terpinggirkan dari pada pengorganisasian. Agnes Heller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (difference) sebagai suatu kategori politik yang utama (Abdilah S, 2002: 16). Di dalam setiap komunitas, walaupun mereka berideologi dan memiliki tujuan bersama, tidak bisa dipungkiri bahwa di dalamnya terdapat berbagai macam individu yang memiliki kepribadian dan identitas masing-masing. Hal ini dikarenakan kepribadian dan identitas individu yang berbeda dan unik, sangat mungkin terjadi dominasi antar individu yang sama-sama memiliki ego dan tujuan pribadi. Sehingga menyebabkan pergeseran kepentingan terkait dengan perebutan kekuasaan dan persaingan untuk mendapatkan posisi strategis bagi tiap individu di dalam komunitas tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa, politik identitas adalah suatu konsep yang menyebutkan bahwa suatu pengorganisasian yang berdasarkan atas kepentingan

politik yang didalam oraganisasi tersebut memiliki kesamaan yang secara langsung ataupun tidak langsung mengikat setiap personil yang ada dalam organisasi tersebut.

#### **A. Gagasan Dan Perkembangan Politik Identitas**

Sebagai suatu konsep yang sangat mendasar, yang dinamakan identitas tentunya menjadi kata yang tidak asing untuk didengar. Terlebih lagi, ini merupakan konsep yang menjadi dasar dalam pengenalan berbagai macam hal. Banyak hal dapat memiliki ciri khas berdasarkan pada identitasnya. Ini juga akan berarti bahwa apabila identitas sudah diketahui, maka dapat diketahui pula keluasan wawasan serta pengetahuannya terhadap sesuatu. (Habibi, 2017: 2). Politik identitas merupakan nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan *belonging* tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya identitas bagi setiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas. (Widayanti, 2009: 14).

Menyebarnya politik identitas atau biopolitik dalam pandangan Foucault merupakan akibat dari runtuhnya “masyarakat yang direncanakan secara ilmiah” yang merupakan suatu gerakan dengan implementasi kontrol demografis objektif. Inilah dasar-dasar biopolitik. Seorang Foucault merasa diasingkan, disendirikan, dengan cara dibaptis yang memaksanya menyangsang suatu identitas baru sebagai seorang kristen. Politik identitas

merupakan ciri khas yang terjadi pada negara dan masyarakat modern (liberal dan demokratis), sebagaimana penyelidikan Foucault, untuk menerapkan prinsip-prinsip ilmiah terhadap tubuh individual dalam proses politik melalui kekuasaan negara. Tujuannya adalah agar orang “tercerahkan”, mencapai pertumbuhan populasi optimum, pertumbuhan generasi yang proporsional, dan lain-lain. Dalam hal ini, tolak ukurnya adalah standar negara, tidak pernah berdasakan individu atau masyarakat. Bagi Foucault, hasilnya ternyata mencengangkan karena sikap ilmiah dan cakupannya ke segala aspek sehingga menjadi kontrol dan tirani absolut. Dengan demikian, tubuh terlempar ke dalam penjara jiwa. (Abdillah, 2002: 61).

## **B. Konsep Politik Identitas**

Politik identitas sendiri merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Dalam filsafat, sebenarnya wacana ini sudah lama muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi Ilmuwan Politik Internasional di Wina, Austria pada 1994. (*Biopolitics: The Politics Of The Body, Race, and Nature*. Brookfeld: Avebury, 1996)

Pertemuan tersebut menghasilkan konsepsi tentang dasar-dasar praktek politik identitas dan menjadikannya sebagai kajian dalam bidang ilmu politik. Agnes Haller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dna gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu

kategori politik yang utama. Setelah kegagalan narasi besar (*grand narrative*), ide perbedaan telah menjadikan suatu kebebasan (*freedom*), toleransi dan kebebasan bermain (*free play*), meskipun kemudian ancaman baru muncul. Politik perbedaan menjadi suatu nama baru dari politik identitas, rasisme (*race thinking*), biofeminisme, dan perselisihan etnis menduduki tempat yang terlarang oleh gagasan besar lama. Berbagai bentuk baru intoleransi, praktek-praktek kekerasan pun muncul. (Heller, 1995: ix).

### **C. Relevansi Politik Identitas**

Dalam situasi keterserakan identitas dan entitas-entitas perbedaan, politik perbedaan dan entitas-entitas perbedaan, politik perbedaan sangat subur dalam situasi negara atau masyarakat yang multikultural dan multietnis. Dalam kerangka ini, hubungan interaktif dalam antar kelompok perbedaan, terutama kelompok etnis yang berbeda-beda harus menjalin suatu kerangka etis, dalam hal ini adalah sikap toleran. Toleransi politik hanya mungkin terjadi dalam suasana politik negara yang demokratis. Oleh karena toleransi politik (*political tolerance*) sangat dipengaruhi oleh sistem, struktur, dan atmosfer politik yang berlaku. John Sullivan *et all* yang menganalisis konsep dan penerapan toleransi politik di tiga negara yang berbeda (Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Israel), menemukan kadar intensitas toleransi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain tingkat kemakmuran ekonomi, struktur dan sistem politik, faktor psikologi politik. (Habibi, 2017: 4)

Konsep politik identitas relevan untuk diterapkan, paling tidak diwacanakan mengingat peta politik masa depan, yang berkembang ke arah politik yang beragam, lebih melihat kembali pada tataran humanitas dan etik. Geoff Mulgan seorang ilmuwan politik, mengemukakan bahwa peran-peran etis dan moral harus dikedepankan. Oleh karena seiring runtuhnya narasi besar, ideologi-ideologi besar, partai-partai politik berkurang perannya. Moralitas pun akan lebih dibuthkan untuk mengatasi gejolak-gejolak politik dan menumbuhkan perilaku politik yang etis dan bermoral. Sejalan dengan Mulgan. Walter Lippman (1950) dalam filsafat publiknya mendorong para politikus demokrasi untuk menjunjung tinggi moralitas berpolitik. Hal ini dikarenakan dalam negara-negara demokratis sekalipun penyakit terbukanya kebebasan akan senantiasa muncul, sehingga perlu adanya suatu tatanan etika dan moralitas demokrasi. (Robert Hafner, 2007 dalam Habibi. 2017: 5).

#### **D. Politik Identitas Modern**

Klaus Von Beyne menganalisis karakter gerakan identitas dalam beberapa tahap perkebangannya, mulai dari tahap pramodern sampai tahap postmodern. Perpecahan fundamental kelompok-kelompok kesukuan dan kebangsaan memunculkan gerakan-gerakan sosial politik yang menyeluruh. Dalam hal ini, mobilisasi secara ideologis diprakarsai oleh para pemimpin. Tujuannya adalah perampasan dan perebutan kekuasaan dari suatu penguasa ke penguasa yang baru. (Habibi, 2017: 5).

Pada tahap modern, gerakan tersebut muncul dengan adanya pendekatan kondisional, keterpecahan membutuhkan sumber-sumber untuk dimobilisasi.

Terjadi keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah, peran pemimpin tidak lagi dominan tujuan akhirnya adalah pembagian kekuasaan. (Habibi, 2017: 5).

Kemudian pada perkembangan postmodern, munculnya gerakan-gerakan itu berasal dari dinamikanya sendiri, protes muncul atas berbagai macam kesempatan individual, tidak ada satu kelompok atau pecahan yang dominan. Pola aksi dan kegiatannya berdasarkan kesadaran diri yang bersifat otonomi sebagai tujuan akhirnya. (Bayme, 1996: 122 dalam Habibi, 2017: 5). Hasil dari analisis Von Bayme digambarkan melalui Tabel 2.1 Tahap Perkembangan Politik Identitas seperti berikut,

**Tabel 2.1**  
**Tahap Perkembangan Politik Identitas**

Pra-Modern		Modern	P e m b e r o n a n	Post-Modern (Anti-Tesis Modern)
1. Hierarki  Pemuka Agama ↓ Bangsawan/Raja ↓ Rakyat  ----- Kekuasaan Gereja  2. Perpecahan fundamental, kelompok kesukuan dan kebangsaan memunculkan gerakan sosial politik yang menyeluruh	P e m b e r o n a n	Deskretes: Aku berfikir, maka aku manusia harus berfikir  1. Manusia/Individu 2. <i>Age of Discoveries</i> ↓ Revolusi Industri (era penemuan) ↓ Kapitalisme ↓ Konsumtif  3. Gerakan tersebut muncul dengan adanya pendekatan kondisional, keterpecahan		1. Orang-orang semakin bebas mengemukakan pendapat  Era identitas manusia  Gaya Hidup (menentukan apa yang dia mau)  Bebas (tidak ada yang benar/salah tapi relatif)  Ada Identitas (citra)  2. Munculnya gerakan-gerakan itu berasal dari dinamikanya sendiri, protes muncul

	membutuhkan sumber untuk dimobilisasi		atas berbagai macam kesempatan individual, tidak ada satu kelompok atau pecahan yang dominan
--	---------------------------------------	--	--

Sumber: Habibi (2017: 6)

Kemunculan politik etnis diawali dengan tumbuhnya kesadaran yang mengidentikan mereka ke dalam suatu golongan atau kelompok etnis tertentu. Kesadaran ini kemudian memunculkan solidaritas kekelompokan dan kebangsaan. Politik etnis mengacu kepada politik “kelompok etnis” dan “minoritas kecil”, sementara penafsiran kelompok etnis bisa mencakup bangsa etnis (*ethnic nation*). Pada wacana politik kontemporer nuansanya lebih sempit. Dalam konteks ini, biasanya kelompok etnis atau minoritas etnis tidak memiliki teritori tertentu. Tujuan mereka pun berbeda dengan nasionalis klasik, mereka tidak menghendaki “determinasi diri kebangsaan” dalam suatu wilayah bangsa (negara). Akan tetapi, lebih pada penerimaan proteksi dan kemajuan bagi kelompok, khususnya bagi individu-individu dalam kelompok itu, dalam suatu negara yang telah ada. (Kellas, 1988: 119)

#### **E. Keuntungan dan Kekurangan Politik Identitas**

Pemaknaan politik identitas antara Kemala dengan Agnes Heller dan Donald L Morowitz sangat berbeda. Kemala melangkah lebih jauh dalam melihat politik identitas yang terjadi pada tataran praktis. Yang biasanya digunakan sebagai alat memanipulasi alat untuk menggalang politik guna kepentingan politik dan ekonomi. Namun pada bagian yang lain, argumen Kemala mengalami kemunduran penafsiran dengan mengatakan bahwa, dalam politik

identitas tentu saja ikatan kesukuan mendapat peranan penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik. (Habibi, 2017: 6).

Pemahaman ini berimplikasi pada kecenderungan untuk: pertama, ingin mendapat pengakuan dan perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, ekonomi, maupun sosial-budaya. Kedua, demi menjaga dan melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. Ketiga, kesetiaan yang kuat terhadap etnisitas yang dimilikinya. (Habibi, 2017: 7).

Gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali “narasi besar” yang prinsipnya mereka tolak dan membangun suatu teori yang mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun perbedaan-perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya. Dalam gerakan politik identitas ada suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid terbaik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan, gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar. Kelemahan dari gerakan politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok khusus. Sebagai contoh, dalam kontestasi Pilkada DKI (2017) terjadi sentimen politik identitas yang sangat kuat, dimana pribumi mengkhuskan diri dan menolak non-pribumi, hal ini terkait dengan ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar untuk menjatuhkan pasangan calon yang lain.

Sedangkan hal positif yang dapat diambil dari politik identitas adalah ada upaya untuk tetap melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan, sehingga penguatan akan budaya tidak akan luntur dan hilang. Penguatan identitas tersebut muncul apabila identitas yang dikonsepsikan untuk mewadahnya dirasa tidak dapat mewakili atau menyatukan kelompok-kelompok tersebut. bahkan, kekuatan kelompok tersebut menimbulkan juga ketegangan antar kelompok untuk memperoleh dominasi dari sebuah konsep yang akan dibangun. Penguatan identitas kelompok untuk menjadikannya sebagai dominasi dalam sebuah wadah atau bahkan keluar dari wadah disebut sebagai politik identitas. Tujuan sebenarnya dari politik adalah mencapai kebaikan bersama. (Habibi, 2017: 7) Maka, baik itu politik identitas atau identitas politik, pemerintahan yang dibangun atas dasar politik tersebut akan memiliki kekuatan yang sangat baik demi mewujudkan kebaikan bersama.

Untuk mendukung penelitian ini, selain politik identitas, digunakan juga teori peran sebagai teori pendukung yang dianalisis di lapangan saat penelitian.

## **2.2 Teori Peran**

Suhardono Edy (2016:3) mengungkapkan peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh sebuah aktor dalam pentas drama yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang

aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan atau unjuk peran (*role performance*).

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang dimilikinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuuk selalu nampak “mumpuni” dan di presepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat (Suhardono Edi, 2016:4)

Menurut Sarwono dalam jurnal Gartiria Hutami (2011) Teori peran (*role theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus harus bermain sebagai tokoh tertentu dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan dapat berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (*sandiwara*) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana hal dalam teater, posisi orang dalam masyarakat dama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.

Menurut Kahn dalam Lidya Agustina (2009) teori peran (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran (*role*) adalah konsep sentral dari teori peran (Shaw & Constanzo 1970). Dengan demikian kajian mengenai teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku didalamnya.

Teori peran selama ini sering digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri. Setidaknya ada dua alasan kegunaan teori peran. Pertama, teori ini mampu memahami perilaku kelompok yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Kedua, teori ini dapat digunakan dengan mengabaikan sistem politik yang lebih besar (sistem internasional) dengan memahami persepsi pengambil kebijakan terhadap “harapan peran” (Folarin, 2010:105). Meskipun demikian, Menurut Walker dalam Agus Haryanto (2014), teori peran sebenarnya merupakan konsep kunci yang menghubungkan perilaku individu dalam hal level analisa. Individu, kelompok, institusi, negara, komunitas, suprasional dan organisasi internasional merupakan sebuah sistem yang terhubung dimana mereka semua merupakan elemen dari sistem yang lebih besar. Perilaku elemen dalam sistem yang lebih besar dapat disebut sebagai peran.

Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) peran merupakan aspek dinamis (*status*), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan status peran. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila orang itu melakukan hak – hak dan kewajiban – kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia

menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah, maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam sttus sosial.

Adapun syarat – syarat peran dalam Soejono Soekanto (2002: 243) mencakup tiga hal penting, yaitu:

- a. Peran meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang, dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilaksanakan oleh individu – individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Veithzal Rivai (2004: 148) peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Miftha Thoha (2005: 10) menyatakan peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Dengan kata lain, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur serta timbul karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi

akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Munculnya interaksi antara mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebut maka suatu peran tersebut akan terbentuk

Fungsi peran yang disampaikan oleh J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) bahwa peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- a. memberi arah pada sosialisasi,
- b. pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai – nilai, norma – norma dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat,
- d. Menghidupkan sistem pengendalian dan kendali, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam – macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Peranan yang diharapkan (*excepted roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat – cermatnya dan harus dilaksanakan serta peranan ini tidak dapat ditawar seperti yang ditentukan.
- b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*) yaitu, cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan

mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Apabila disimpulkan pendapat para ahli tersebut, maka peran dapat diartikan sebagai serangkaian tindakan yang diusahakan untuk mampu membuat suatu perubahan dalam perkumpulan sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat banyak dan menjadi penghubung serta pemecah masalah bagi hubungan masyarakat.

## **2.3 Literasi**

### **A. Pengertian Literasi**

Literasi merupakan kemampuan dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas (Buku Saku Gerakan Literasi Sekolah, 2016:8). Literasi suatu keterampilan penting dalam hidup serta sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan literasi. Kegiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis. Menurut Deklarasi Praha pada tahun 2003 yang terdapat dalam Buku Induk Gerakan Literasi (2016: 7) menyebutkan bahwa literasi mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya (UNESCO, 2003).

UNESCO dalam Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (2016: 8) mengungkapkan bahwa literasi dapat mengembangkan kepribadian diri dalam hal

etika dan sikap. Dengan kemampuan literasi peserta didik dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih percaya diri dan pemberani. Kesadaran akan terbentuk sendiri dalam diri peserta didik, karena pengetahuan baru yang dapat mendorong untuk menyampaikan apa yang baru ditemukan sehingga membuat peserta didik lebih aktif baik di masyarakat maupun dalam hidup pribadinya. Dengan kemampuan literasi, peserta didik dapat bertindak dan menyesuaikan tindakan dengan baik. Selain daripada itu, literasi juga dapat meningkatkan kesehatan, pengembangan sosial, politik dan bahkan ekonomi sebuah negara.

Deklarasi UNESCO menyebutkan bahwa literasi terkait pula dengan kemampuan untuk mengidentifikasi, menentukan, menemukan, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan. Kemampuan-kemampuan tersebut perlu dimiliki tiap individu sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat informasi, dan itu bagian dari hak dasar manusia menyangkut pembelajaran sepanjang hayat (Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah, 2016: 7).

Berdasarkan pada informasi-informasi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi adalah sebuah kemampuan untuk memahami, mengidentifikasi, menggunakan, dan mengaplikasikan sebuah informasi dalam kehidupan sehari-hari untuk digunakan sebagai pemecahan masalah dan menemukan solusi-solusi yang bermanfaat bagi kehidupan di masa yang akan datang.

## **B. Gerakan Literasi Sekolah**

Buku Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah (2016: 7) menyebutkan bahwa gerakan literasi sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah (peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid peserta didik), akademisi, penerbit, media massa, masyarakat (tokoh masyarakat), dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Gerakan literasi sekolah merupakan upaya partisipatif yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan pembiasaan peserta didik dalam hal membaca serta dengan adanya gerakan literasi diharapkan masyarakat mampu menggerakkan warga lainnya, pemegang kewenangan untuk bersama-sama memiliki, melaksanakan, dan menjadikan gerakan membaca sebagai bagian penting dalam kehidupan.

### **C. Tujuan Gerakan Literasi Sekolah**

Buku desain induk gerakan literasi sekolah (2016:5), tujuan gerakan literasi sekolah dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Berikut ini tujuan gerakan literasi sekolah, di antara lain:

#### **a. Tujuan Umum**

Menumbuhkembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat (*long life learning*).

#### **b. Tujuan Khusus**

1) Menumbuhkembangkan budaya literasi di sekolah

2) Meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat.

- 3) Menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan.
- 4) Menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca.

## **2.4 Komunitas**

### **A. Pengertian Komunitas**

Pengertian Komunitas yang diakses di Wikipedia Indonesia menjelaskan bahwa istilah komunitas berasal dari bahasa latin *communitas* yang berasal dari dari kata dasar *communis* yang bermakna masyarakat, publik, atau banyak orang. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa pengertian komunitas adalah sebagai sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber, preferensi, kebutuhan, resiko, dan sejumlah kondisi lain serupa.

Cholil Mansyur (1987: 69) menyatakan bahwa Komunitas adalah sebuah kelompok sosial yang terdiri dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama, komunitas dalam konteks manusia, individu-individu didalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko, dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Menurut Mac Iver dalam Mansyur (1987: 69), *community* diistilahkan sebagai persekutuan hidup atau paguyuban dan dimaknai sebagai suatu daerah masyarakat yang ditandai dengan beberapa tingkatan pertalian kelompok sosial

satu sama lain. Keberadaan komunitas biasanya didasari oleh beberapa hal yaitu lokalitas dan *sentiment community*

Iriantara (2004: 22) mendefinisikan makna komunitas adalah sekumpulan individu yang mendiami lokasi tertentu dan biasanya terkait dengan kepentingan yang sama. Sedangkan menurut Wenger (2004: 4) komunitas itu adalah sekumpulan orang yang saling berbagi masalah, perhatian, atau kegemaran terhadap suatu topik dan memperdalam pengetahuan serta keahlian mereka dengan saling berinteraksi secara terus-menerus

Menurut Mac Iver dalam Soerjono Soekanto (1983: 143), unsur unsur dalam *sentiment community* adalah:

a. Perasaan yang sama

Unsur perasaan yang sama muncul akibat adanya anggota dalam komunitas yang mengidentifikasi dirinya dengan kelompok dikarenakan adanya kesamaan kepentingan

b. Penanggungan

Penanggungan maksudnya adalah kesamaan beban yang dipikul dan dirasakan. Sepenanggungan diartikan sebagai kesadaran akan peranan dan tanggung jawab anggota komunitas dalam kelompoknya

c. Saling memerlukan

Unsur saling memerlukan diartikan sebagai perasaan ketergantungan terhadap hak komunitas baik yang sifatnya fisik maupun psikis

## **B. Konsep Komunitas**

Menurut Montagu dan Matson dalam Ambar Sulistiyani (2004: 81-82), terdapat sembilan konsep komunitas yang baik dan empat kompetensi masyarakat, yakni:

- a. Setiap anggota komunitas berinteraksi berdasar hubungan pribadi dan hubungan kelompok
- b. Komunitas memiliki kewenangan dan kemampuan mengelola kepentingannya secara bertanggungjawab
- c. Memiliki viabilitas, yaitu memecahkan masalah sendiri
- d. Pemerataan distribusi kekuasaan
- e. Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi demi kepentingan bersama
- f. Komunitas memberi makna pada anggota
- g. Adanya heterogenitas dan beda pendapat
- h. Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat kepada yang berkepentingan
- i. Adanya konflik dan *managing conflict*

Kemudian untuk melengkapi sebuah komunitas yang baik perlu ditambahkan kompetensi sebagai berikut:

- a. Kemampuan mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas
- b. Menentukan tujuan yang hendak dicapai dan skala prioritas
- c. Kemampuan menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai tujuan
- d. Kemampuan bekerjasama secara rasional dalam mencapai tujuan

Komunitas dapat menjalin ikatan bersama karena memiliki suatu persamaan yang dirasakan, persamaan itu bisa merupakan suatu tujuan ataupun persamaan karena memiliki suatu latar belakang yang sama. Ikatan komunitas bisa tercerai berai karena tujuan yang sudah tercapai atau adanya ikatan lain yang lebih kuat.

### **C. Bentuk Paguyuban atau Komunitas**

Dalam kaitan komunitas yang diartikan sebagai paguyuban atau *gemeinschaft*, paguyuban dimaknai sebagai suatu bentuk kehidupan bersama dimana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, alamiah, dan kekal, biasanya dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga, rukun warga dan lain sebagainya. (Soekanto, 1983: 128-129).

Ciri-ciri *gemeinschaft* menurut Tonnies dalam Soekanto (1983: 130-131), yaitu: 1) hubungan yang intim, 2) Privat, 3) eksklusif. Tipe *gemeinschaft* sendiri ada tiga, yaitu:

- *Gemeinschaft by blood*, hubungannya didasarkan pada hubungan darah atau keturunan
- *Gemeinschaft of place*, hubungannya didasarkan pada kedekatan tempat tinggal atau kesamaan lokasi
- *Gemeinschaft of mind*, hubungannya didasarkan pada kesamaan ideologi meskipun tidak memiliki ikatan darah ataupun tempat tinggal yang berdekatan

Menurut Mac Iver dalam Mansyur (1987, 80-81), keberadaan *communal code* (keberagaman aturan dalam kelompok) mengakibatkan komunitas terbagi menjadi dua, yaitu:

1). *Primary group*, hubungan antar anggota komunitas lebih intim dalam jumlah anggota terbatas dan berlangsung dalam jangka waktu relatif lama. Contoh: keluarga, suami-istri, pertemanan, guru-murid, dan lain-lain.

2). *Secondary group*, hubungan antar anggota tidak intim dalam jumlah anggota yang banyak dan dalam jangka waktu relatif singkat. Contoh: perkumpulan profesi, atasan-bawahan, perkumpulan minat/hobi, dan lain-lain

Menurut Etienne Wenger (2004: 24). Komunitas mempunyai berbagai bentuk dan karakteristik, diantaranya:

- 1). Besar atau kecil
- 2). Terpusat atau tersebar
- 3). Berumur lama atau berumur pendek
- 4). Internal atau eksternal
- 5). Homogen atau heterogen
- 6). Spontan atau disengaja
- 7). Tidak dikenal atau dibawah institusi

Dalam hal ini, komunitas Teras Senja dapat dikategorikan ke dalam bentuk *gemeinschaft of mind* atau komunitas yang didasarkan pada kesamaan ideologi atau pemikiran, untuk menciptakan minat baca anggota masyarakat Kecamatan Banjarsari dan menjadi bagian dari *secondary group* dimana komunitas ini terbentuk karena kesamaan minat anggotanya.

#### **D. Peran Komunitas Dalam Politik Identitas**

Komunitas terbentuk dari suatu identitas yang diusung, bisa komunitas agama, asal daerah, profesi, dan lain sebagainya. Komunitas yang terbentuk lama

kelamaan memerlukan pengaruh politik untuk mendapatkan sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi komunitasnya.

Komunitas dapat membentuk suatu partai dimana partai tersebut dapat mempengaruhi masyarakat lain yang memiliki kondisi yang sama. seperti contohnya adalah ketika komunitas islam bersatu dalam kemenangan pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2018. Pada saat itu, beramai-ramai masyarakat muslim memilih calon yang berasal dari kalangan muslim karena sebelumnya terdapat pelecehan yang dilontarkan oleh calon gubernur terhadap agama islam.

Selain contoh kasus di atas terdapat contoh kasus-kasus lain yang menggambarkan adanya peran komunitas dan kaitan politik identitas untuk memenuhi kebutuhan komunitas tersebut.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Politik identitas telah memberikan bukti secara empiris dalam salah satu bagian pada tema sosio-politik. Penelitian sebelumnya yang memiliki tema hubungan politik identitas terhadap masyarakat adalah sebagaimana berikut;

Jurnal yang pertama merupakan karya ilmiah dari Juhana Nasrudin yang berjudul “*POLITIK IDENTITAS DAN REPRESENTASI POLITIK (STUDI KASUS PADA PILKADA DKI PERIODE 2018-2022)*” sumber Jurnal studi agama-agama ISSN 2089-8835 Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018: 34-47 UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam jurnal tersebut dikemukakan bahwa politik identitas mempengaruhi kecenderungan warga dalam rangka pemilu di DKI Jakarta periode 2018-2022. Para tokoh masyarakat berhasil memberikan pengaruh kepada

masyarakat untuk memilih calon gubernur yang mereka dukung, para tokoh masyarakat itu melakukan kampanye dengan menyampaikan isu-isu politik yang berhubungan dengan agama, ekonomi, kebijakan, dan etnis. Secara langsung, pandangan yang disampaikan para tokoh masyarakat ini diikuti oleh warga masyarakat. Dengan melalui metode pengambilan data dengan cara interview terhadap tokoh, masyarakat dan analisis media, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa politik identitas yang dilakukan para aktor politik berhasil mempengaruhi pilihan warga masyarakat.

Hasil penelitian selanjutnya berasal dari *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 4, No. 2 (2019) 187-217. Karya Wening Purbatin Palupi Soenjoto dengan judul “EKSPLOITASI ISU POLITIK IDENTITAS TERHADAP IDENTITAS POLITIK PADA GENERASI MILENIAL INDONESIA DI ERA 4.0” dari STITNU Al-Hikmah Mojokerto dikeluarkan oleh JISH Pascasarjana UIN Walisongo Semarang dengan nomor seri ISSN 2527-8401. Pada jurnal tersebut disampaikan bahwa politik identitas memiliki kaitan dengan budaya Indonesia yang menggambarkan adanya pengakuan kebersamaan, gotong royong, dan kekompakkan. Dengan mengambil subjek kalangan milenial di era 4.0 yaitu para remaja yang berada pada rentang usia 15-25 tahun, para aktor politik menyampaikan pandangan politik mereka kepada para kaum millennial dengan tujuan dapat mempengaruhi pandangan kaum milenial tersebut agar memiliki kesamaan pandangan dengan aktor politik tersebut. Ditunjang oelh kemajuan teknologi dan informasi di era 4.0, strategi komunikasi untuk mendoktrin politik identitas kepada kamu milenial menjadi semakin cepat, mudah, dan

juga murah. Menyampaikan pandangan politik dengan cara tersebut dikatakan berhasil, karena dilihat dan dianalisis dari hasil penelitian, bahwa kalangan anak muda jadi mempunyai pandangan politik yang sama dengan apa yang disampaikan oleh para aktor politik tersebut. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan itu mengungkapkan bahwa politik identitas berhasil mempengaruhi cara pandang politik masyarakat milenial.

Hasil dari penelitian-penelitian tersebut telah membawa pada suatu dugaan sementara atau hipotesis bahwa, politik identitas yang disampaikan oleh para aktor politik itu dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seperti halnya dalam penelitian ini, maka dapat diambil dugaan bahwa peran tokoh masyarakat dalam menggiring masyarakat untuk meningkatkan kemampuan literasinya.

## **2.6 Kerangka Pikiran**

Politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik (Setyaningrum, 2005: 19).

Maka dapat disimpulkan bahwa, politik identitas adalah suatu konsep yang menyebutkan bahwa suatu pengorganisasian yang berdasarkan atas kepentingan politik yang didalam organisasi tersebut memiliki kesamaan yang secara langsung ataupun tidak langsung mengikat setiap personil yang ada dalam organisasi tersebut

Literasi merupakan kemampuan dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas (Buku Saku Gerakan Literasi Sekolah, 2016:8). Literasi suatu keterampilan penting dalam hidup serta sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan literasi. Kegiatan literasi selama ini identik dengan aktivitas membaca dan menulis. Menurut Deklarasi Praha pada tahun 2003 yang terdapat dalam Buku Induk Gerakan Literasi (2016: 7) menyebutkan bahwa literasi mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya (UNESCO, 2003).

Peningkatan kemampuan literasi masyarakat perlu ditingkatkan dan distimulasi dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan kegiatan membaca yang disertai penyediaan fasilitas bacaan dan pengarahan oleh para tokoh masyarakat untuk memaksa para masyarakat agar mau melakukan dan meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan membaca yang diwadahi di Tempat Baca Masyarakat.

Dengan melalui pengaruh tokoh masyarakat sebagai aktor politik untuk mempengaruhi pola pikir warga agar mau meningkatkan minat bacanya, sejatinya masyarakat akan tergerak untuk mengikuti pengaruh yang dikehendaki oleh para aktor politik, melalui pengaruh para tokoh masyarakat, para warga akan terpengaruh untuk meningkatkan minat bacanya agar dapat meningkatkan kemampuan literasi yang akan meningkatkan wawasan dan pengetahuan sehingga masyarakat akan mampu untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Gambaran mengenai kerangka penelitian, digambarkan secara sederhana melalui gambar 2.1 kerangka pikiran sebagai berikut;

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pikiran**

